

Dampak sampingan program bantuan tunai: Bukti dari data randomized control trial di Indonesia

Efi Yuliani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok.
Email: efiyuliani@bps.go.id

Abstrak

Tujuan utama dari pemberian program bantuan tunai adalah untuk meningkatkan outcome kesehatan dan pendidikan sebagai indikator pembangunan manusia yang mendasar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian bantuan tunai tersebut memiliki dampak sampingan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan tunai terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga. Studi ini memanfaatkan data randomized control trial dari desain eksperimental program bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Adapun jangka waktu dari evaluasi dampak dalam studi ini yakni setelah enam tahun implementasi. Data baseline diperoleh dari Survei Evaluasi Dampak Program PNPM Generasi 2007, sedangkan data follow-up diperoleh dari Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 2013. Dengan menggunakan estimasi dampak intention-to-treat (ITT), diperoleh kesimpulan bahwa program bantuan tunai PKH tidak terbukti secara statistik memiliki dampak terhadap akumulasi aset tahan lama yang dilihat dari kepemilikan televisi, kulkas, dan HP. Hasil studi ini sekaligus memberikan jawaban atas kekhawatiran penggunaan bantuan tunai yang rentan untuk disalahgunakan oleh rumah tangga meskipun diberikan dengan kondisi atau syarat tertentu.

Kata Kunci: Aset tahan lama; bantuan tunai; randomized control trial

The sideways impact of cash transfer program: Evidence from randomized control trial in Indonesia

Abstract

The main objective of providing cash transfer program is to improve health and education outcomes as basic human development indicators. However, it is possible that the provision of cash assistance has 'sideway' effects. This study aims to analyze the impact of the cash transfer program on household durable asset accumulation. This study utilizes randomized control trial data from the experimental design of the Hopefull Family Program (PKH) as a conditional cash transfer program in Indonesia. The period of impact evaluation in this study is after six years of implementation. Baseline data were obtained from the 2007 PNPM Generasi Program Impact Evaluation Survey, while follow-up data was obtained from the 2013 Health and Education Services Survey. Using the intention-to-treat (ITT) impact estimate, it was concluded that the PKH cash transfer program was not statistically proven. has an impact on the accumulation of durable assets as seen from the ownership of television, refrigerator, and cellphone. The results of this study at the same time provide answers to concerns about the use of cash transfers that are vulnerable to abuse by households even though they are given with certain conditions or conditions.

Keywords: Durable assets; cash assistance; randomized trial control

PENDAHULUAN

Program bantuan tunai menjadi salah satu bentuk dari strategi perlindungan sosial pemerintah di negara berkembang selain redistribusi dalam bentuk bantuan *in-kind*. Bantuan tunai memiliki beberapa keuntungan utama yaitu memiliki biaya transaksi yang lebih rendah dan lebih mudah untuk dipantau dalam hal mengurangi kecurangan dalam proses pelaksanaannya. Dari sisi desain, pemberian bantuan tunai tergolong umum untuk semua jenis intervensi bantuan sosial (termasuk siapa yang harus menerima manfaat, berapa banyak yang harus diberikan). Namun, dampak kesejahteraan dari program bantuan tunai terhadap penerima manfaat sangat bergantung pada bagaimana bantuan tunai tersebut digunakan oleh mereka (Das, 2018).

Seiring dengan penggunaan program bantuan tunai yang militan, pemerintah harus mewaspadai dampak sampingan dari pemberian bantuan ini. Uang tunai sangat fleksibel untuk digunakan, terutama bila diberikan tanpa syarat. Uang dapat dibelanjakan dengan berbagai cara karena memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan/atau keinginan mereka. Kondisi ini juga dapat berdampak pada perilaku yang berbeda terhadap investasi produktif, pasokan tenaga kerja, dan konsumsi yang dimediasi oleh karakteristik rumah tangga penerima (Prifti dkk., 2020; Haushofer & Shapiro, 2016). Dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa masyarakat miskin dapat dipercaya untuk menggunakan transfer dengan bijak.

Kunci penting yang membentuk pola kemiskinan pangan dan kerawanan gizi, selain masalah alam pertanian, adalah penggunaan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membiayai gaya hidup yang lebih konsumtif (McCarthy, 2020). Ada kekhawatiran tentang respon sampingan masyarakat miskin terhadap perubahan pendapatan, yakni kecenderungan untuk mengumpulkan aset tahan lama (*durable assets*) dibandingkan memenuhi asupan gizi anak-anak mereka. Aset tahan lama yang dimiliki rumah tangga seperti kulkas dan handphone saat ini dianggap sebagai kebutuhan yang menggambarkan status sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah program bantuan tunai berdampak terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga di Indonesia?”.

Menyelidiki dampak sampingan dari program bantuan tunai dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang mengapa banyak negara telah membuat kemajuan luar biasa dalam pengentasan kemiskinan tetapi tidak meningkatkan indikator ketahanan pangan. Di Indonesia, meskipun tingkat kemiskinan telah menurun dari 38,7 persen pada tahun 2000 menjadi 9,2 persen pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tetap tinggi, dan mereka menderita kekurangan gizi (BPS, 2000; BPS, 2019). Perilaku belanja rumah tangga yang terkait dengan akumulasi aset untuk gaya hidup dapat menyebabkan kesalahan dalam menargetkan bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat miskin. Misalnya, rumah tangga yang ternyata rentan bisa jadi tidak dianggap miskin berdasarkan kepemilikan aset sebagai standar hidup meskipun faktanya mereka kesulitan mengakses makanan (Nasrudin dkk., 2020; McCarthy, 2020; McCarthy & Sumarto, 2018). Jika program bantuan tunai memiliki dampak sampingan seperti itu, kita tidak akan pernah melihat keberhasilan program tersebut dalam hal peningkatan ketahanan pangan.

Literatur yang berkembang mengenai dampak bantuan tunai dalam konteks dampak sampingan masih terbatas dan seringkali diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan pemberian bantuan tunai dapat menyebabkan orang miskin bekerja lebih sedikit dan bergantung pada bantuan tersebut. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan dampak dari bantuan tunai atau program perlindungan sosial lainnya terhadap partisipasi tenaga kerja (Banerjee dkk., 2016; Schmieder & Trenkle, 2020; Baird dkk., 2018; Salehi dkk., 2018; Tagliati, 2019). Das (2018) dan Handa dkk. (2018b) meneliti dampak bantuan tunai terhadap pengeluaran barang-barang *temptation* (tembakau dan alkohol), tetapi keduanya menemukan kesimpulan yang berbeda. Sementara itu, fakta lain menunjukkan bahwa bantuan tunai meningkatkan kemungkinan pembelian atap logam dan furnitur (Haushofer & Shapiro, 2016). Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal mengisi kesenjangan literatur mengenai dampak sampingan program bantuan tunai dan menyelesaikan perdebatan kebijakan yang sedang berlangsung mengenai efektivitas program bantuan tunai.

Kontribusi lain dari studi ini yakni penggunaan data *randomized control trials* (RCT) dari salah satu program bantuan tunai di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Studi ini menganalisis dampak pemberian bantuan tunai PKH berdasarkan dua tahun panel data yang

dikumpulkan sebelum dan sesudah pemberian bantuan dengan jangka waktu implementasi program selama enam tahun. Untuk menjawab tujuan penelitian, estimasi yang digunakan dalam studi ini yaitu estimasi dampak intention-to-treat (ITT).

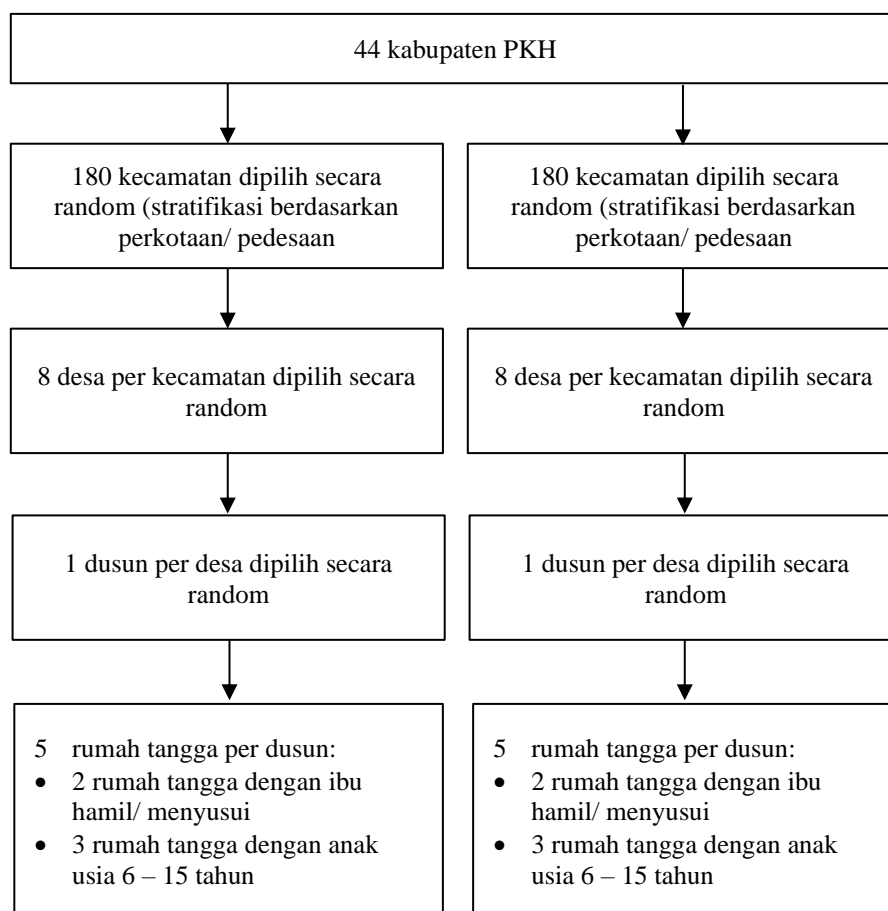
Adapun aset tahan lama yang dipakai dalam studi ini dan dipertimbangkan sebagai aset dalam penilaian standar hidup terdiri dari televisi, kulkas, dan handphone (HP). Menggunakan estimasi ITT, studi ini menemukan hasil bahwa program bantuan tunai PKH tidak berdampak secara statistik pada akumulasi aset baik televisi, kulkas, maupun HP. Selain itu, jika dilihat dampaknya secara ekonomi, ternyata selama enam tahun implementasi program bantuan tunai PKH, dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap akumulasi ketiga aset tersebut sangat kecil, yakni hanya berkisar 0,10 hingga 1,12 poin persentase relatif terhadap kelompok kontrol. Hasil ini sekaligus memberikan informasi berkaitan dengan kekhawatiran penggunaan bantuan tunai PKH yang rentan untuk disalahgunakan oleh rumah tangga meskipun diberikan dengan kondisi atau syarat tertentu.

Bagian kedua dari studi ini menjelaskan metode penelitian yang menjelaskan data penelitian seperti waktu dan tempat penelitian beserta metodologi analisis. Pada bagian ketiga, ditampilkan hasil dan pembahasan analisis dampak pemberian bantuan tunai PKH. Bagian keempat menyajikan simpulan dari keseluruhan studi.

METODE

Implementasi program bantuan tunai PKH dilakukan pemerintah secara bertahap. Pada tahap paling awal, pemberian bantuan PKH hanya diberikan di tujuh provinsi di Indonesia pada tahun 2007. Ketujuh provinsi tersebut yakni Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dalam pengimplementasian program PKH, pemerintah membuat evaluasi desain dengan melakukan survei di enam provinsi dari tujuh provinsi pilot. Adapun provinsi yang tidak menjadi sampel survei yakni Sumatera Barat. Survei baseline dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2007 oleh World Bank (Evaluasi Dampak Program PNPM Generasi 2007). Sedangkan survei follow-up enam tahun kemudian dilakukan pada bulan September hingga November 2013 oleh Tim Nasional Percepatan Penggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan instrumen Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 2013 (SPKP). Adapun sampel dari survei merupakan rumah tangga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tunai PKH sebelum program tersebut mulai dijalankan. Kriteria yang dimaksud adalah rumah tangga yang memiliki anak usia 6 - 15 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar, atau rumah tangga yang memiliki anak usia 0 - 6 tahun atau terdapat ibu hamil/ menyusui.

Pemilihan sampel untuk survei baseline berada di 44 kabupaten yang tersebar di enam provinsi sampel. Kemudian dari 44 kabupaten tersebut dipilih secara random sebanyak 180 kecamatan perlakuan dan 180 kecamatan kontrol, sehingga terdapat 360 kecamatan sampel dalam survei. Dalam pemilihan sampel kecamatan, digunakan stratifikasi berdasarkan status wilayah perkotaan dan pedesaan. Kecamatan diklasifikasikan sebagai pedesaan jika bagian dari kelurahan kurang dari 30 persen dari total kelurahan dan desa berdasarkan PODES 2005. Dari 180 kecamatan pada masing-masing kelompok, diambil sebanyak 8 desa per kecamatan dengan syarat masing-masing desa memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan PKH. Masing-masing desa yang terpilih di kedua kelompok diambil secara random sebanyak 1 dusun dan masing-masing dusun diambil secara random 5 rumah tangga. Adapun 5 rumah tangga tersebut terdiri dari 2 rumah tangga dengan ibu hamil/ menyusui serta 3 rumah tangga yang memiliki anak usia 6 hingga 15 tahun. Secara total, rumah tangga pada survei baseline berjumlah 14.326 rumah tangga. Adapun ilustrasi pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam studi ini, dipertimbangkan attrisi pada sampel survei follow-up. Dengan kata lain, sampel rumah tangga yang dianalisis hanyalah rumah tangga yang berhasil disurvei kembali enam tahun kemudian. Rumah tangga pada sampel baseline yang tidak berhasil diwawancara setelah enam tahun kemudian dikeluarkan dalam analisis. Selain itu, attrisi juga disebabkan oleh beberapa isian variabel yang *missing*. Oleh karena itu, total sampel dalam studi ini menjadi 13.623 rumah tangga (6.660 di kelompok perlakuan dan 6.963 di kelompok kontrol) atau sebanyak 95,09% dari jumlah sampel baseline.



Gambar 1. Proses pemilihan sampel survei baseline PKH

Balance test

Sebelum membahas strategi empiris, pertama-tama studi ini melakukan *balance test* untuk menunjukkan apakah randomisasi data berhasil dalam menghasilkan kelompok perlakuan yang sebanding.

Tabel 1. Statistik sampel baseline berdasarkan kecamatan perlakuan dan kontrol untuk semua sampel

Variabel	Perlakuan	Rata-rata	Kontrol	Rata-rata	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah anggota rumah tangga	6.660	5,13	6.963	5,20	-0,07**
Usia KRT (tahun)	6.660	43,31	6.963	43,07	0,24
Rasio ketergantungan	6.660	0,92	6.963	0,94	-0,02
Status perkawinan KRT (1: kawin; 0: lainnya)	6.660	0,91	6.963	0,92	-0,00
Lama sekolah KRT (tahun)	6.660	4,69	6.963	4,79	-0,10
Agama KRT (1: islam; 0: lainnya)	6.660	0,78	6.963	0,80	-0,01*
Status pekerjaan KRT (1: bekerja; 0: lainnya)	6.660	0,95	6.963	0,95	-0,00
Lapangan usaha pekerjaan KRT (1: pertanian; 0: lainnya)	6.660	0,78	6.963	0,75	0,03***
Sumber air minum (1: bersih; 0: lainnya)	6.660	0,79	6.963	0,80	-0,00
Pengeluaran bulanan (Juta Rupiah)	6.660	0,96	6.963	0,97	-0,01

Keterangan: level signifikansi: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Tabel 1 menunjukkan hasil *balance test* untuk keseluruhan sampel menggunakan beberapa karakteristik rumah tangga. Kolom 3 dan kolom 5 menunjukkan rata-rata variabel baseline terpilih untuk

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Selanjutnya, kolom 6 menunjukkan perbedaan rata-rata kedua kelompok beserta keterangan level signifikansi yang menandakan kesetaraan kedua kelompok. Secara umum, hasil *balance test* menunjukkan bahwa randomisasi data telah berhasil untuk menghasilkan kedua kelompok yang sebanding. Hal ini dapat menjadi jaminan bahwa hasil dari sebuah perlakuan akan minim bias karena kedua kelompok memiliki karakteristik yang mirip. Beberapa variabel terlihat memiliki perbedaan namun tidak terlalu signifikan, misalnya variabel jumlah anggota rumah tangga, variabel agama kepala rumah tangga (KRT), serta lapangan usaha KRT.

Strategi empiris

Untuk menginvestigasi dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga di Indonesia, studi ini menggunakan estimasi dampak intention-to-treat (ITT) yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$ITT = E(Y_{1i}|Z_i = 1) - E(Y_{0i}|Z_i = 0)$$

dimana Y_{1i} adalah variabel outcome dari rumah tangga i yang menerima bantuan tunai PKH, dan Y_{0i} adalah variabel outcome dari rumah tangga i yang tidak menerima bantuan tunai PKH. Z_i adalah variabel dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga berada di kecamatan PKH dan bernilai 0 jika rumah tangga tidak berada di kecamatan PKH. Oleh karena itu, ITT akan menangkap dampak dari pemberian program bantuan tunai PKH bagi rumah tangga yang berada di kecamatan yang secara random dipilih untuk menerima bantuan tunai PKH.

Hasil dari *balance test* menunjukkan masih terdapat sedikit perbedaan karakteristik rumah tangga meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, studi ini memasukkan beberapa variabel karakteristik rumah tangga dalam spesifikasi regresi untuk estimasi ITT. Adapun spesifikasi regresi estimasi ITT untuk mengetahui dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{1i} = \beta_0 + \beta_1 Z_i + \beta_2 Y_{0i} + \beta_3 V_{0i} + \eta_k + \varepsilon_i$$

Dimana i mengindekskan rumah tangga dan k mengindekskan kabupaten. Y_{1i} merupakan variabel outcome (setelah enam tahun implementasi program PKH), dimana terdapat tiga outcome dalam studi ini yaitu kepemilikan televisi, kepemilikan kulkas, serta kepemilikan HP. Variabel kepemilikan aset tahan lama ini merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga memiliki aset tahan lama yang dimaksud dan bernilai 0 jika lainnya. Z_i merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga berada di kecamatan PKH dan bernilai 0 jika rumah tangga tidak berada di kecamatan PKH. β_1 merepresentasikan perbedaan rata-rata atau yang disebut dengan *average treatment effect* (ATE) antara outcome untuk rumah tangga di kelompok perlakuan relatif terhadap kelompok kontrol. Y_{0i} adalah kondisi outcome pada saat baseline.

Adapun notasi V_{0i} merupakan vektor variabel karakteristik rumah tangga pada kondisi baseline. Terakhir, notasi η_k merupakan *fixed effect* kabupaten dan notasi ε_i merupakan komponen error. Karakteristik rumah tangga yang digunakan dalam spesifikasi regresi yaitu jumlah anggota rumah tangga, usia KRT, rasio ketergantungan, status perkawinan KRT, lama sekolah KRT, agama KRT, lapangan usaha pekerjaan KRT, pengeluaran bulanan rumah tangga. Variabel jumlah anggota rumah tangga merupakan data numerik dengan satuan orang/ jiwa dan variabel usia KRT merupakan data numerik dengan satuan tahun. Variabel rasio ketergantungan dihitung dari jumlah anggota rumah tangga usia non-produktif dibandingkan dengan jumlah anggota rumah tangga usia produktif dalam satu rumah tangga. Untuk variabel status perkawinan KRT, digunakan variabel dummy bernilai 1 jika KRT berstatus kawin dan bernilai 0 jika lainnya (belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati). Variabel lama sekolah KRT merupakan data numerik dengan satuan tahun. Variabel agama KRT merupakan variabel dummy dimana variabel akan bernilai 1 jika KRT beragama islam dan bernilai 0 jika KRT beragama lainnya (katholik, protestan, budha, hindu, marappu, atau lainnya). Variabel lapangan usaha pekerjaan KRT juga merupakan variabel dummy, dimana variabel bernilai 1 jika KRT berusaha di sektor pertanian dan bernilai 0 jika KRT bekerja di sektor lainnya (sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air, konstruksi bangunan, perdagangan, akomodasi, transportasi, lembaga keuangan, jasa, atau sektor lainnya). Variabel pengeluaran bulanan rumah tangga merupakan total pengeluaran rumah tangga baik untuk makanan maupun non-makanan dalam satu bulan dengan satuan juta rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Randomisasi *experimental design* program bantuan tunai PKH dilakukan pada level kecamatan. Pemerintah sudah melakukan pembentukan kerangka sampel dimana sudah dipastikan terdapat desa-desa di kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tunai PKH, yaitu rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini tercermin dari hasil analisis deskriptif yang bisa dilihat pada Tabel 2.

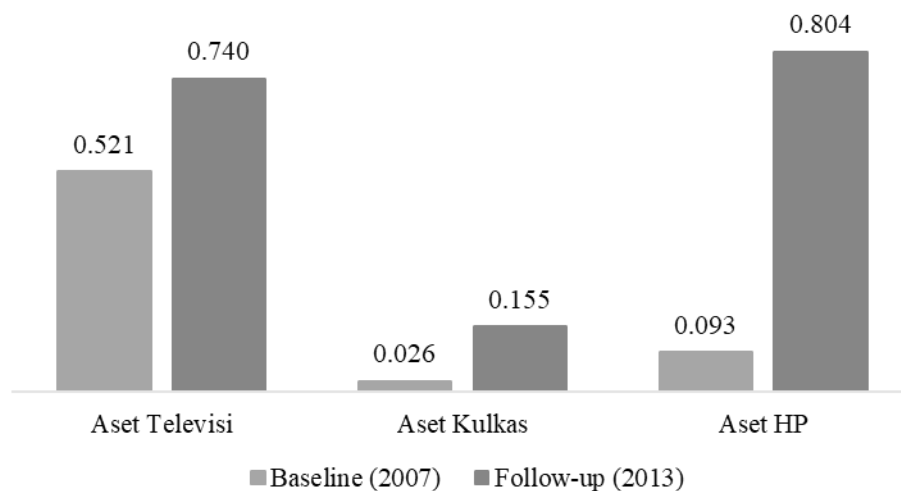
Tabel 2. Ringkasan statistik variabel dalam penelitian

	Baseline (2007)			Follow-up (2013)		
	Obs.	Rata-rata	Std. Dev	Obs.	Rata-rata	Std. Dev
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karakteristik rumah tangga						
Jumlah anggota rumah tangga	13.623	5,162	1,782	13.623	5,700	2,179
Usia KRT (tahun)	13.623	43,188	11,092	13.623	47,878	10,341
Rasio ketergantungan	13.623	0,926	0,630	13.623	0,711	0,655
Status perkawinan KRT (1: kawin; 0: lainnya)	13.623	0,915	0,279	13.623	0,877	0,328
Lama sekolah KRT (tahun)	13.623	4,745	3,699	13.623	4,668	3,908
Agama KRT (1: islam; 0: lainnya)	13.623	0,791	0,407	13.623	0,792	0,406
Status pekerjaan KRT (1: bekerja; 0: lainnya)	13.623	0,947	0,225	13.623	0,922	0,268
Lapangan usaha pekerjaan KRT (1: pertanian; 0: lainnya)	13.623	0,765	0,535	13.623	0,701	0,605
Sumber air minum (1: bersih, 0: lainnya)	13.623	0,795	0,404	13.623	0,799	0,401
Pengeluaran bulanan (Juta Rupiah)	13.623	0,967	0,903	13.623	2,215	3,615
Variabel outcome						
Aset televisi	13.623	0,521	0,500	13.623	0,740	0,439
Aset kulkas	13.623	0,026	0,160	13.623	0,155	0,362
Aset HP	13.623	0,093	0,291	13.623	0,804	0,397

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata rumah tangga dalam sampel memiliki anggota rumah tangga yang besar yaitu lebih dari 5. Dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar, rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga tidak sampai satu juta rupiah pada saat survei baseline tahun 2007. Kemudian pada saat survei follow-up, pengeluaran bulanan rumah tangga mengalami kenaikan menjadi dua jutaan rupiah. Namun, nominal ini masih tergolong rendah mengingat rata-rata jumlah anggota keluarga yang relatif besar. Jika dilihat dari variabel usia kepala rumah tangga KRT, rata-rata rumah tangga miskin ini dipimpin oleh kepala rumah tangga yang masih muda dengan rata-rata lama sekolah hanya 4,8 tahun pada saat survei baseline dan 4,7 tahun pada saat survei follow-up. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel dalam studi ini memang mencerminkan mayoritas masyarakat miskin dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar, pengeluaran yang rendah, dan tidak banyak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Bahkan, dari ringkasan statistik ini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata KRT tidak menamatkan pendidikan dasar berdasarkan informasi lama pendidikan KRT yang kurang dari 5 tahun. Selain itu, sebagian besar KRT beragama muslim, yaitu sebanyak 79,1 persen.

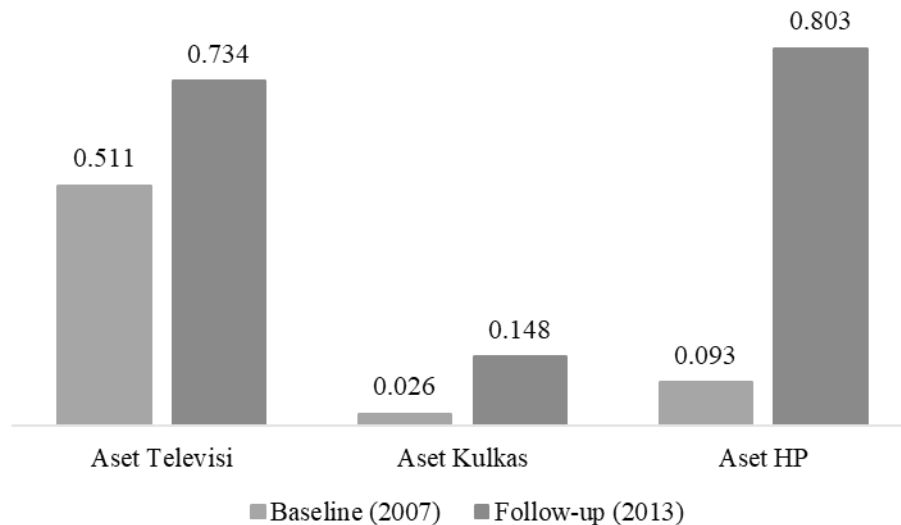
Tabel 2 juga memberikan informasi bahwa rata-rata KRT berstatus bekerja dengan lapangan usaha mayoritasnya adalah pertanian. Informasi ini juga sejalan dengan kondisi bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia menggantungkan kehidupan mereka di sektor pertanian. Pada saat survei baseline, sebanyak 76,5 persen KRT bekerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan), dimana sisanya sebanyak 23,5 persen bekerja di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air, konstruksi bangunan, perdagangan, akomodasi, transportasi, lembaga keuangan, jasa, dan sektor lainnya. Pada saat survei follow-up, terjadi perubahan sektor lapangan usaha KRT yang cukup signifikan. Sebanyak 6,4 persen KRT mengubah mata pencaharian mereka keluar sektor pertanian seperti yang terlihat pada kolom 5. Informasi ini menjadi petunjuk kasar bahwa pemberian bantuan tunai PKH ternyata cukup dapat mendorong rumah tangga

miskin untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor yang memberikan imbalan yang lebih baik di luar sektor pertanian. Namun, jika dilihat dari status pekerjaan, justru pada saat survei follow-up ditemukan penurunan status bekerja KRT sebesar 2,5 persen seperti yang terlihat pada kolom 2 dan kolom 5. Dari ringkasan statistik Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki sumber air minum yang bersih. Lebih dari 20 persen rumah tangga dalam sampel minum air yang tidak terjamin kebersihannya. Bahkan hingga enam tahun setelah survei baseline, tidak terdapat perubahan yang signifikan dari sumber air minum mereka. Dimana pada saat survei follow-up, masih ditemukan lebih dari 20 persen rumah tangga dengan sumber air minum yang tidak bersih. Sumber air minum bersih dalam studi ini mencakup air ledeng (PAM), sumur pompa, sumur, dan air mineral. Sedangkan sumber air minum yang tidak bersih dalam studi ini mencakup air hujan, danau, sumber mata air, air sungai/ kali, air dari pantai (penetrasi air laut), dan sumber air minum lainnya.



Gambar 2. Perbandingan rata-rata variabel outcome pada baseline dan follow-up pada total sampel (13.623 rumah tangga)

Dilihat secara keseluruhan sampel, perubahan rata-rata variabel outcome pada survei baseline dan survei follow-up dapat dilihat pada Gambar 2. Secara umum, keseluruhan jenis aset mengalami kenaikan kepemilikan oleh rumah tangga. Aset yang paling banyak mengalami kenaikan kepemilikan yaitu HP. Pada saat baseline, hanya sebanyak 9,3 persen rumah tangga yang memiliki aset HP dari total sampel baik rumah tangga yang berada di kecamatan PKH maupun bukan kecamatan PKH. Enam tahun kemudian atau pada saat follow-up survei, terdapat sebanyak 80,4 persen rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka memiliki aset Hp. Dengan demikian, kepemilikan HP mengalami kenaikan sebesar 764,52 persen selama enam tahun. Padahal, dari ketiga jenis aset dalam studi ini, HP menjadi aset nomor dua yang dimiliki rumah tangga dalam sampel. Enam tahun kemudian, HP menjadi aset yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga dengan kenaikan yang sangat pesat. Kenaikan kepemilikan aset yang juga cukup pesat yaitu kulkas dengan kenaikan kepemilikan sebesar 496,15 persen selama enam tahun dari tahun 2007 hingga 2013. Namun, meskipun kenaikannya cukup pesat, hanya sebanyak 15,5 persen rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka memiliki aset kulkas pada saat follow-up survei. Jumlah ini tentu masih tergolong sangat rendah. Televisi menjadi aset yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga sampel pada saat survei baseline. Namun demikian, aset ini hanya mengalami kenaikan sebesar 42,04 persen selama enam tahun, dimana pada saat survei baseline terdapat 52,1 persen rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka memiliki aset televisi dan pada saat follow up survei terdapat 74 persen rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka memiliki aset televisi.



Gambar 3. Perbandingan rata-rata variabel outcome pada baseline dan follow-up pada sampel perlakuan (6.660 rumah tangga)

Secara lebih spesifik, jika dilihat pada sampel di kelompok perlakuan atau sampel rumah tangga yang berada di kecamatan PKH, terdapat pola yang hampir mirip dibandingkan dengan kondisi pada keseluruhan sampel. Pada kelompok sampel ini, aset HP juga menjadi aset yang mengalami kenaikan paling tinggi yakni mencapai 763,44 persen. Selain itu, aset kulkas juga mengalami kenaikan kepemilikan yang cukup pesat selama enam tahun. Pada saat survei baseline, rumah tangga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tunai PKH ini belum mulai mendapatkan bantuan. Pada saat itu, rumah tangga yang memiliki kulkas hanya 2,6 persen saja dari keseluruhan sampel yang berada di kecamatan PKH. Kemudian pada saat survei endline, rumah tangga pada kelompok sampel ini melaporkan bahwa sebanyak 14,8 persen rumah tangga memiliki aset kulkas. Dimana kenaikan kepemilikan pada aset ini juga cukup signifikan karena mencapai 469,23 persen. Sedangkan untuk aset televisi, sebelum bantuan tunai PKH diberikan, rata-rata rumah tangga ini sudah memiliki televisi (lebih dari 50 persen).

Hasil estimasi intention-to-treat (ITT)

Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi intention-to-treat (ITT) untuk dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga di Indonesia. Aset tahan lama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga aset yakni televisi, kulkas, dan HP. Dampak terhadap masing-masing aset disajikan dengan dua versi yakni tanpa variabel penjelas dan dengan variabel penjelas berupa variabel-variabel karakteristik rumah tangga. Hasil untuk dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset televisi disajikan pada kolom 1 (tanpa variabel penjelas) dan kolom 2 (dengan variabel penjelas). Sedangkan dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset kulkas dan aset HP secara berturut-turut disajikan pada kolom 3 dan kolom 4 serta kolom 5 dan kolom 6. Secara umum, hasil estimasi ITT baik menggunakan variabel penjelas maupun tidak menggunakan variabel penjelas menghasilkan koefisien yang hampir mirip. Selain itu, dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi ketiga aset juga menunjukkan kesimpulan yang sama.

Dari baris pertama Tabel 3 untuk kolom 1 hingga kolom 6, dapat kita simpulkan bahwa setelah enam tahun implementasi, program bantuan tunai PKH tidak terbukti secara statistik memiliki dampak sampingan berupa akumulasi aset tahan lama berupa televisi, kulkas, dan HP. Dimana seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa ketiga aset ini dipilih sebagai representasi aset yang mencerminkan gaya hidup dan umumnya dipakai dalam penilaian standar hidup rumah tangga. Secara ekonomi, dampak dari bantuan tunai PKH juga sangat kecil meskipun dampak dilihat dalam jangka waktu menengah (enam tahun setelah implementasi). Hal ini terlihat dari besarnya koefisien estimasi ITT dari variabel perlakuan yang hanya berkisar 0,10 hingga 1,12 poin persentase relatif terhadap kelompok kontrol. Oleh karena itu, hasil studi ini bisa dijadikan sebagai jawaban akan kekhawatiran penggunaan bantuan tunai PKH

yang rentan untuk disalahgunakan oleh rumah tangga meskipun diberikan dengan kondisi atau syarat tertentu.

Tabel 3. Koefisien estimasi intention-to-treat (ITT)

	Variabel outcome: Aset televisi (1: memiliki; 0: lainnya)		Variabel outcome: Aset kulkas (1: memiliki; 0: lainnya)		Variabel outcome: Aset HP (1: memiliki; 0: lainnya)	
	ITT	ITT	ITT	ITT	ITT	ITT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Z (1: kecamatan PKH; 0: lainnya)	-0,0067 (0,0207)	-0,0010 (0,01108)	-0,0112 (0,0094)	-0,0086 (0,0085)	-0,0009 (0,0107)	0,0022 (0,0077)
Aset televisi baseline (1: memiliki; 0: lainnya)		0,2180*** (0,0109)				
Aset kulkas baseline (1: memiliki; 0: lainnya)				0,4209*** (0,0216)		
Aset HP baseline (1: memiliki; 0: lainnya)						0,0697*** (0,0073)
Jumlah anggota rumah tangga		0,0052** (0,0024)		0,0038* (0,0020)		0,0138*** (0,0022)
Usia KRT (tahun)		-0,0009* (0,0005)		0,0006* (0,0003)		-0,0015*** (0,0003)
Rasio ketergantungan		-0,0301*** (0,0050)		-0,0270*** (0,0049)		-0,0352*** (0,0059)
Lama sekolah KRT (tahun)		0,0073*** (0,0012)		0,0088*** (0,0009)		0,0118*** (0,0011)
Agama KRT (1: islam; 0: lainnya)		0,3149*** (0,0205)		0,0566*** (0,0138)		0,1628*** (0,0165)
Lapangan usaha pekerjaan KRT (1: pertanian; 0: lainnya)		-0,0234*** (0,0072)		-0,0483*** (0,0097)		-0,0284*** (0,0060)
Pengeluaran bulanan (Juta Rupiah)		0,0135*** (0,0029)		0,0190*** (0,0047)		0,0116*** (0,0032)
Fixed effect kabupaten	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observasi	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
Rata-rata kontrol	0,5305	0,5305	0,0270	0,0270	0,0932	0,0932
R-squared	0,1298	0,2837	0,0401	0,1028	0,0362	0,0838

Keterangan: level signifikansi: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Robust standard errors dikelompokkan di tingkat kecamatan dalam tanda kurung.

Hasil estimasi ITT dari studi ini sejalan dengan penemuan Stoeffler dkk. (2020) yang mengkaji dampak bantuan tunai terhadap akumulasi aset rumah tangga penerima setelah 18 bulan intervensi. Dengan menggunakan teknik Difference in differences (DiD) dan propensity score matching (PSM), mereka menemukan bahwa transfer tunai tidak berdampak secara statistik pada akumulasi aset tahan lama dan material bangunan perumahan seperti bahan atap yang lebih baik. Namun, hasil penelitian dalam studi ini menemukan hasil yang berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handa dkk. (2018a). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa transfer tunai berdampak secara statistik terhadap akumulasi aset, termasuk aset domestik (seperti furnitur). Perbedaan hasil evaluasi dampak dari program transfer tunai di beberapa negara tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya besaran/ size dari bantuan itu sendiri, mekanisme pemberian bantuan, serta durasi pemberian bantuan. Oleh karena itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pemberian bantuan tunai ini tentu akan sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

SIMPULAN

Paper ini menganalisis dampak program bantuan tunai PKH terhadap akumulasi aset tahan lama rumah tangga di Indonesia. Aset tahan lama yang dipakai dalam studi ini dan dipertimbangkan sebagai aset dalam penilaian standar hidup terdiri dari tiga aset yakni televisi, kulkas, dan handphone (HP). Dengan memanfaatkan data hasil *experimental design* PKH dengan survei follow-up setelah enam tahun

implementasi, diperoleh hasil bahwa program bantuan PKH tidak berdampak secara statistik pada akumulasi aset baik televisi, kulkas, maupun HP. Selain itu, jika dilihat dampaknya secara ekonomi, ternyata selama enam tahun implementasi program bantuan tunai PKH, dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap akumulasi ketiga aset tersebut sangat kecil, yakni hanya berkisar 0,10 hingga 1,12 poin persentase relatif terhadap kelompok kontrol. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handa dkk. (2018a) namun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stoeffler dkk. (2020). Hasil studi ini menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan apakah pemberian bantuan tunai memberikan dampak sampingan yang rentan mengubah status kemiskinan rumah tangga akibat kepemilikan aset tahan lama yang menggambarkan standar hidup dari suatu rumah tangga. Dimana bisa jadi rumah tangga tersebut memiliki aset tahan lama namun masih rawan pangan sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Selain itu, paper ini juga berkontribusi terhadap literatur mengenai dampak sampingan program bantuan tunai melalui penggunaan data *randomized control trials* (RCT) dari salah satu program bantuan tunai di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan periode evaluasi jangka menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2000). Peta Penduduk Miskin (Poverty Map) Indonesia 2000. (1), iv+370: *Badan Pusat Statistik*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019, (1), xvi+72. Badan Pusat Statistik, Jakarta. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Baird, S., McKenzie, D., & Özler, B. (2018). The effects of cash transfers on adult labor market outcomes. *IZA Journal of Development and Migration*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40176-018-0131-9>
- Banerjee, A. V., Hanna, R., Kreindler, G., & Olken, B. A. (2016). Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer Programs Worldwide. *SSRN*
- Das, S. (2018). *Cash and Food? Tackling Poverty with Conditional Transfers*. (January).
- Handa, S., Daidone, S., Peterman, A., Davis, B., Pereira, A., Palermo, T., & Yablonski, J. (2018a). Myth-busting? Confronting six common perceptions about unconditional cash transfers as a poverty reduction strategy in Africa. *World Bank Research Observer*, 33(2), 259–298. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky003>
- Handa, S., Natali, L., Seidenfeld, D., Tembo, G., & Davis, B. (2018b). Can unconditional cash transfers raise long-term living standards? Evidence from Zambia. *Journal of Development Economics*, 133, 42–65. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.008>
- Haushofer, J., & Shapiro, J. (2016). Household Response to Income Changes: Evidence from an Unconditional Cash Transfer Program in Kenya. *Working Paper*, 1–57. Retrieved from https://www.princeton.edu/~joha/publications/Haushofer_Shapiro_UCT_2013.pdf
- McCarthy, J. F., and M. Sumarto. (2018). Distributional Politics and Social Protection in Indonesia. Dilemmas of Layering, Nesting and Social Fit in Jokowi's Poverty Policy. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35 (2): 223–236.
- McCarthy, J. F. (2020). The paradox of progressing sideways: food poverty and livelihood change in the rice lands of outer island Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 47(5), 1077–1097. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1628021>
- Nasrudin, R., Olivia, S., & Gibson, J. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Prifti, E., Daidone, S., Pace, N., & Davis, B. (2020). Heterogeneous impacts of cash transfers on farm profitability. Evidence from a randomised study in Lesotho. *European Review of Agricultural Economics*, 47(4), 1531–1558. <https://doi.org/10.1093/erae/jbz050>
-

-
- Salehi-Isfahani, D., & Mostafavi-Dehzoeei, M. H. (2018). Cash transfers and labor supply: Evidence from a large-scale program in Iran. *Journal of Development Economics*, 135, 349–367. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.08.005>
- Schmieder, J. F., & Trenkle, S. (2020). Disincentive effects of unemployment benefits and the role of caseworkers. *Journal of Public Economics*, 182, 104096. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.104096>
- Stoeffler, Q., Mills, B., & Premand, P. (2020). Poor households' productive investments of cash transfers: Quasi-experimental evidence from Niger. *Journal of African Economies*, 29(1), 63–89. <https://doi.org/10.1093/jae/ejz017>
- Tagliati, F. (2019). Child Labor Under Cash and In-Kind Transfers: Evidence from Rural Mexico. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3472904>